

# InternationalMedia

SABTU 8 JULI 2023

HARGA ECERAN DALAM KOTA RP2500, LUAR KOTA+ONGKOS KIRIM



## PRESIDEN PANTAU PROGRAM PAPUA PANDAI BERHITUNG

Presiden Joko Widodo memberikan pertanyaan matematika kepada seorang siswa SD dalam audiensi Program Papua Pandai Berhitung di Jayapura, Papua, Jumat (7/7). Program Papua Pandai Berhitung tersebut merupakan metode pembelajaran matematika metode Gasing (gampang, asyik, menyenangkan) yang digagas Profesor Yohanes untuk anak-anak di Indonesia, khususnya di Papua.

# 'Tenaga Honorer' Dihapus Per November, Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Massal

Dari 2,3 juta tenaga honorer mayoritas ada di pemerintahan daerah. Walau per November 2023 tenaga honorer dihapus, dipastikan tak ada PHK massal.

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah dan DPR kini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer yang

jumlahnya mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan

Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023.

"Dari awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000, ternyata begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah," ujar Deputy Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PANRB), Alex Denni, melalui keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/7).

"Perintah Presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR, mengkaji opsinya di RUU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP," ujar Alex Denni.

Pedoman pertama yang harus dipahami semua pihak adalah

tidak boleh ada pemberhentian (PHK massal).

"Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja," ujarnya.

Ada beberapa opsi yang dirumuskan pemerintah terkait penghapusan tenaga honorer.

► Bersambung ke hal 11

## KPK Bidik Istri Rafael Alun Terkait Kasus Pencucian Uang

**JAKARTA (IM)** - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterlibatan Ernie Meike Torondek dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo. Ernie Meike Torondek merupakan istri Rafael Alun.

Ada peluang untuk menjerat Ernie Meike Torondek jika terbukti terlibat dalam pencucian uang suaminya. Saat ini, KPK masih menelusuri dugaan adanya keterlibatan Ernie Meike dalam penyamaran ataupun pengalihan hasil korupsi Rafael Alun ke sejumlah aset.

"Ya kita lihat seperti apa perbuatan-perbuatannya di dalam

rangkain TPPU itu. Kan di Pasal 3 itu TPPU aktif, Pasal 4, 5 kan TPPU pasif," kata Plt Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur saat dikonfirmasi, Jumat (7/7).

"Apakah dia memang turut serta, misalkan menyembunyikan, mengalihkan, merubah bentuk dan lain-lain, atau tidak tahu, enggak ngerti gitu saja," sambungnya.

Perlu diketahui bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pencucian uang berpotensi dijera pidana. Namun, harus ada unsur pidana yang membuktikan keterlibatan pihak lainnya tersebut. KPK bakal menjeratnya jika

► Bersambung ke hal 11

## Data 34 Juta Paspur Bocor, Jokowi Diminta Fokus Bentuk Komisi PDP

**JAKARTA (IM)** - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak agar mempercepat proses pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi, seperti dalam amanat undang-undang buat mengawasi pengelolaan dan mengantisipasi kasus kebocoran data terulang.

"Presiden sebaiknya memberikan atensi khusus dalam pembentukan lembaga pengawas PDP, sebagaimana dimandatkan Pasal 58 (3) UU PDP," kata Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar, saat dihubungi, Kamis (6/7).

Menurut Wahyudi, lembaga perlindungan data pribadi sebaiknya menjadi otoritas yang kuat, bertanggung jawab langsung kepada presiden, dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, guna menjamin efektivitas implementasi dari UU PDP.

Kasus kebocoran data yang berulang di Indonesia memperlihatkan masih terdapat celah dalam sistem keamanan

pengelolaan data, baik dari pihak swasta maupun lembaga pemerintahan.

Contohnya, kasus kebocoran data operator internet IndiHome. Kasus teranyar adalah dugaan kebocoran 34,9 juta data paspor WNI yang dilakukan oleh peretas Bjorka.

Kedua kasus diatas menggambarkan rentannya pelanggaran perlindungan data pribadi (data breach), yang melibatkan pengendali data badan publik,

► Bersambung ke hal 11

## Mencekam, 100 Karyawan Pabrik Kesurupan, Teriak 'Pengin Kepala'

**MAJALENGKA (IM)** - Mencekam! Sekitar seratusan orang karyawan salah satu pabrik di wilayah Majalengka, Jawa Barat, mendadak kesurupan serentak.

Kabar soal kesurupan massal ini pun heboh di media sosial.

Dalam video berdurasi 19 detik yang diunggah di media sosial (medsos) terlihat mencekam.

Dalam video tersebut terlihat seorang perempuan tengah duduk di kursi roda sambil mengurai-ngurai rambut.

Ia menangis sambil meminta sesuatu.

"Haayang huluuu... haaayang huluuu... (Mau kepala, mau kepala)," kata perempuan yang kesurupan itu.

Peristiwa kesurupan massal ini terjadi pada Kamis (6/7), pukul 11.00 WIB.

Seratusan orang mengalami kesurupan secara bersamaan.

"Kurang lebih 100 karyawan yang kesurupan," kata Kapolres Majalengka AKBP

► Bersambung ke hal 11



## KONFERENSI PERS MENLU RETNO MARSUDI

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan keterangan pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (7/7). Retno Marsudi menyampaikan persiapan rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) yang berlangsung pada 11-14 Juli 2023 dan akan diikuti oleh 29 negara, plus ASEAN Secretariat hingga Uni Eropa.

Kunjungi Website Kami di: <https://internationalmedia.co.id>

Yayasan Tzu Chi Indonesia  
Menyebarkan dan Mempraktikkan  
Kebajikan  
(Master Cheng Yen)

intiland

Bagus PIPi  
KIDS Surgical Mask  
Masker anak nyaman digunakan sehari-hari  
Masker Anak BFE\*  
\*Sesuai Standarisasi ENI4683:2019 ≥ 98%  
3Ply Masker  
Nyaman dipakai sehari-hari

ASALTAU!  
Gara-gara Gunakan Emoji Jempol Petani di Kanada Didenda Rp924 Juta



ANDA perlu hati-hati menggunakan emoji jempol saat membalas pesan yang masuk.

Sebab emoji jempol yang anda kirim bisa dianggap sebagai tanda tangan digital, yang artinya menyetujui surat kontrak yang dikirim ke Anda.

Seorang petani di Saskatchewan, Kanada didenda dalam jumlah besar karena menggunakan emoji jempol setelah dia dikirim kontrak melalui pesan teks.

Dikutip BBC, Chris Achter berargumen bahwa itu untuk mengakui tanda terima, tetapi seorang hakim memutuskan bahwa itu

► Bersambung ke hal 11

SANDIMAS  
GRANITE & SANITARY

ACE  
The helpful place.

BANK MAYAPADA  
Melayani Dengan Komitmen

KursRupiah		
MATA UANG	JUAL	BELI
USD	15.152,00	15.128,00
SGD	11.221,00	11.191,00
AUD	10.074,00	10.024,00
HKD	1.968,00	1.908,00
EUR	16.492,00	16.242,00
GBP	19.527,00	19.227,00

Jumat 7 Juli 2023 15:28 WIB